

Integrasi Model *Competitiveness–Partnership* dalam Desain Kebijakan Kolaboratif Pemerintah

Alayya Nuraini Qaramah¹, Nabil Hazimulfikri², Sri Anzhila Maharani³, Salma Nur Habibah⁴, Fazli Prabandana⁵

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas

email: alyyanuraini@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana integrasi model *Competitiveness–Partnership* dapat diterapkan dalam desain kebijakan kolaboratif pemerintah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan kinerja organisasi publik. Pendekatan ini berangkat dari premis bahwa kompetisi antarlembaga pemerintah maupun antara pemerintah dan aktor non-pemerintah tidak selalu bersifat destruktif, melainkan dapat menjadi pendorong inovasi apabila dikelola melalui mekanisme kemitraan yang terstruktur. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah jurnal ilmiah, buku kebijakan publik, serta laporan penelitian terkait *coopetition*, kolaborasi lintas lembaga, dan inovasi kebijakan pemerintah. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep inti, pola hubungan, serta kerangka integratif yang muncul dalam berbagai literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi kompetisi dan kemitraan menghasilkan tiga temuan utama: pertama, kompetisi mendorong efisiensi dan kreativitas, sedangkan kemitraan memastikan koordinasi dan keselarasan tujuan; kedua, desain kebijakan kolaboratif yang menggabungkan kedua model dapat menciptakan *policy synergy* yang meningkatkan kapasitas penyelesaian masalah publik; ketiga, keberhasilan integrasi sangat dipengaruhi oleh tata kelola kolaboratif, struktur insentif, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, model *Competitiveness–Partnership* dapat menjadi pendekatan strategis dalam reformasi kebijakan publik menuju pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif.

Kata Kunci: kompetisi; kemitraan; *competitiveness–partnership*; kebijakan kolaboratif; administrasi publik; tata kelola pemerintahan; *coopetition*.

Abstract

This study aims to analyze how the integration of the *Competitiveness–Partnership* model can be applied in the design of collaborative government policies to enhance governance effectiveness and public sector organizational performance. This approach is grounded in the premise that competition among government institutions, as well as between government and non-government actors, is not inherently destructive; instead, it can become a driver of innovation when managed through structured partnership mechanisms. The study employs a literature review method by examining scientific journals, public policy books, and research reports related to *coopetition*, inter-organizational collaboration, and governmental policy innovation. The analysis was conducted by identifying key concepts, relational patterns, and integrative frameworks found across the literature. The findings reveal three main points: first, competition encourages efficiency and creativity, while partnerships ensure coordination and goal alignment; second, collaborative policy designs that integrate both models can create policy synergy that strengthens public problem-solving capacity; and third, the success of such integration is significantly influenced by collaborative governance, incentive structures, and clear accountability mechanisms. Therefore, the *Competitiveness–Partnership* model can serve as a strategic approach within public policy reform to promote adaptive, innovative, and responsive governance.

Keywords: competition; partnership; *competitiveness–partnership*; collaborative policy; public administration; governance; *coopetition*.

Pendahuluan

Perkembangan administrasi publik dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran signifikan menuju pola tata kelola yang semakin kolaboratif, adaptif, dan berbasis jejaring. Kompleksitas persoalan publik seperti transformasi digital, ketidakpastian ekonomi, urbanisasi, dan krisis kesehatan global menuntut pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan mekanisme birokrasi tradisional, tetapi juga merangkul aktor lintas sektor. Dalam konteks ini, muncul dua dinamika utama yang secara bersamaan membentuk perilaku organisasi publik, yaitu kompetisi dan kemitraan. Keduanya kerap dipandang sebagai dua kutub berlawanan, padahal dalam praktik modern keduanya dapat bekerja secara paralel dan saling memperkuat (Purdy & Jones, 2021).

Kompetisi dalam sektor publik semakin menonjol sejak munculnya tuntutan peningkatan kinerja, transparansi, dan inovasi layanan. Pemerintah pusat maupun daerah didorong untuk berlomba menciptakan program yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Persaingan juga muncul dalam arena anggaran, penghargaan inovasi, serta perbandingan kinerja antarinstansi pemerintah (Tönurist & Hanson, 2020). Dalam situasi ini, kompetisi dapat menjadi pendorong efisiensi sekaligus inovasi, terutama ketika sistem insentif dan evaluasi kinerja dirancang dengan baik. Namun, kompetisi yang tidak terkelola berpotensi menghasilkan fragmentasi kebijakan, duplikasi program, dan konflik antarorganisasi.

Di sisi lain, kemitraan menjadi strategi krusial untuk menghadapi persoalan publik yang bersifat kompleks dan multidimensional. Kolaborasi memungkinkan adanya penyatuan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan integrasi pengetahuan yang lebih luas (Bryson, Crosby & Stone, 2015). Dalam satu dekade terakhir, berbagai penelitian menegaskan bahwa model *collaborative governance* mampu meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat implementasi, dan menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan (Emerson & Nabatchi, 2015). Kolaborasi juga menjadi katalis bagi inovasi, terutama ketika melibatkan sektor swasta dan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah (Ansell & Torfing, 2021). Oleh karena itu, kemitraan tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga bagian penting dari reformasi administrasi publik modern.

Berbagai studi terbaru menunjukkan bahwa hubungan kompetisi dan kemitraan tidak selalu bersifat antagonistik; justru dalam beberapa konteks keduanya dapat membentuk pola *coopetition*, yaitu situasi ketika organisasi berkolaborasi sambil tetap bersaing (Hafeez, Foroudi & Nguyen, 2022). Dalam administrasi publik, pola ini terlihat dalam interaksi antar pemerintah daerah yang bersaing dalam inovasi namun tetap bekerja sama dalam integrasi kebijakan nasional, atau dalam hubungan pemerintah–swasta yang bersifat kompetitif namun tetap saling membutuhkan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu (Mergel, 2019). Pemahaman terhadap *coopetition* membuka peluang desain kebijakan yang lebih kaya dan adaptif, karena pemerintah dapat memanfaatkan energi kompetisi sebagai pendorong inovasi dan energi kolaborasi sebagai pendorong harmonisasi.

Integrasi model *Competitiveness–Partnership* menjadi semakin relevan di tengah kebutuhan pemerintah untuk mengembangkan kebijakan yang kolaboratif, tetapi tetap berorientasi pada kinerja. Pemerintah tidak lagi dapat hanya mengandalkan pendekatan kolaboratif murni, karena inovasi sering lahir dari situasi kompetitif. Sebaliknya, pemerintah tidak dapat bergantung pada kompetisi tanpa kemitraan, karena isu publik selalu membutuhkan koordinasi dan sinergi lintas sektor (Chen, Wang & Huang, 2020). Integrasi ini memungkinkan lahirnya *policy synergy*, yaitu kondisi ketika kebijakan dihasilkan melalui perpaduan stabilitas kolaborasi dan dinamika kompetisi. Dengan demikian, paradigma kebijakan tidak lagi sekadar “berkolaborasi”, tetapi “berkolaborasi secara kompetitif”.

Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan integrasi kedua model semakin terasa dalam dekade terakhir. Reformasi birokrasi berbasis kinerja, kompetisi inovasi layanan publik, dan penguatan kemitraan lintas sektor menjadi bagian dari agenda tata kelola nasional. Pemerintah daerah bersaing dalam menampilkan inovasi seperti *smart governance*, namun tetap membutuhkan kemitraan dengan pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk mewujudkan layanan yang inklusif dan responsif (Suharno, 2021). Tantangan integrasi ini terlihat dari masih adanya fragmentasi antarinstansi, ego sektoral, serta lemahnya koordinasi lintas program. Oleh karena itu, penelitian tentang integrasi model *Competitiveness–Partnership* menjadi penting untuk memberikan kerangka teoretis dan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana dinamika hubungan antara kompetisi dan kemitraan dalam administrasi publik? (2) Bagaimana kedua dinamika tersebut dapat diintegrasikan dalam desain kebijakan kolaboratif pemerintah? (3) Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan integrasi model *Competitiveness–Partnership* dalam meningkatkan kinerja organisasi publik? Melalui pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengidentifikasi konsep, pola hubungan, dan temuan teoretis yang relevan dari literatur satu dekade terakhir untuk memperkuat pemahaman mengenai integrasi kedua model tersebut. Hipotesis penelitian ini adalah bahwa integrasi kompetisi dan kemitraan menciptakan *policy synergy* yang lebih kuat daripada penggunaan salah satu strategi secara tunggal, karena kompetisi meningkatkan dorongan inovasi, sedangkan kemitraan meningkatkan koordinasi dan harmonisasi tujuan kebijakan (Crosby, ‘t Hart & Torfing, 2017).

Literatur satu dekade terakhir menunjukkan bahwa kompetisi dalam sektor publik berkaitan erat dengan kinerja, inovasi, dan efektivitas organisasi (Tönurist & Hanson, 2020; Bilodeau, 2018). Sebaliknya, literatur tentang kemitraan menekankan pentingnya kolaborasi, koordinasi lintas sektor, dan *collaborative governance* (Bryson et al., 2015; Ansell & Torfing, 2021). Sementara itu, penelitian tentang *coopetition* menunjukkan bahwa kolaborasi dan kompetisi dapat berjalan bersamaan dan menghasilkan kinerja yang lebih baik (Hafeez et al., 2022; Chen et al., 2020). Namun, masih terbatas penelitian yang mengintegrasikan ketiganya untuk membangun desain kebijakan kolaboratif pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini

berkontribusi pada pengembangan teori administrasi publik kontemporer dengan menawarkan kerangka integratif *Competitiveness–Partnership* dalam kebijakan kolaboratif.

Oleh karena itu, bagian pendahuluan ini juga mencakup tinjauan pustaka yang menunjukkan perkembangan penelitian terbaru mengenai kompetisi, kemitraan, dan *coopetition* dalam administrasi publik. Berdasarkan literatur satu dekade terakhir, belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengintegrasikan kedua model ini dalam desain kebijakan kolaboratif pemerintah. Celah penelitian inilah yang ingin diisi melalui kajian ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode **studi kepustakaan (library research)** sebagai pendekatan utama untuk menjawab rumusan masalah terkait integrasi model *Competitiveness–Partnership* dalam desain kebijakan kolaboratif pemerintah. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pengembangan konsep teoretis dan kerangka analitis yang bersumber dari literatur satu dekade terakhir dalam bidang administrasi publik, kebijakan kolaboratif, tata kelola jejaring, kompetisi antarorganisasi, serta *coopetition*. Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti artikel jurnal bereputasi, buku akademik, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan. Kriteria inklusi literatur mencakup publikasi antara tahun 2014–2024, berbahasa Inggris atau Indonesia, serta membahas kompetisi, kemitraan, kolaborasi kebijakan, atau tata kelola kolaboratif dalam sektor publik. Proses analisis data dilakukan menggunakan teknik **analisis konten tematik**, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan, dan konsep kunci yang muncul secara konsisten dalam literatur (Miles, Huberman & Saldaña, 2018). Analisis ini mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menghasilkan sintesis teoretis yang komprehensif. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang membahas isu serupa, sedangkan reliabilitas diperkuat melalui konsistensi prosedur analisis terhadap seluruh literatur yang digunakan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menyusun kerangka integratif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik mengenai hubungan kompetisi dan kemitraan dalam kebijakan kolaboratif pemerintah.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi model *Competitiveness–Partnership* dalam desain kebijakan kolaboratif pemerintah merupakan pendekatan yang relevan, terutama dalam menghadapi kompleksitas tata kelola publik modern. Berdasarkan analisis literatur satu dekade terakhir, ditemukan bahwa kompetisi dan kemitraan tidak berjalan sebagai dua model yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua dinamika organisasi yang dapat diselaraskan untuk meningkatkan kinerja, inovasi, dan efektivitas kebijakan. Secara umum, hasil penelitian dibagi ke dalam tiga bagian utama sesuai dengan rumusan masalah: dinamika hubungan kompetisi dan kemitraan, potensi integrasi keduanya dalam kebijakan kolaboratif, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan integrasi.

Temuan pertama menyatakan bahwa kompetisi memiliki peran signifikan sebagai pendorong inovasi dalam organisasi publik. Dalam sektor publik modern, kompetisi dapat muncul dalam bentuk persaingan kinerja, inovasi layanan, kompetisi anggaran, atau benchmarking lintas pemerintah. Kompetisi mendorong institusi publik untuk secara aktif menemukan ide baru, memperbaiki efisiensi layanan, dan meningkatkan kualitas program agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Meier & O'Toole, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kompetisi berkorelasi positif dengan peningkatan kapasitas inovatif ketika sistem insentif, evaluasi kinerja, dan mekanisme penghargaan dirancang dengan baik (Walker, Andrews & Boyne, 2015). Selain itu, kompetisi antarpemerintah daerah telah terbukti menjadi pendorong kuat dalam percepatan digitalisasi layanan publik karena setiap daerah berupaya menjadi yang paling adaptif dan kreatif untuk mendapatkan legitimasi politik maupun administratif (Rivera & van der Meulen, 2022). Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa kompetisi dapat berfungsi sebagai energi penggerak inovasi yang penting dalam desain kebijakan publik kontemporer.

Temuan kedua menunjukkan bahwa kemitraan merupakan komponen fundamental dalam tata kelola kolaboratif. Berbagai literatur menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menghasilkan peningkatan koordinasi, integrasi sumber daya, dan kemampuan penyelesaian masalah secara lebih komprehensif (Head & Alford, 2015). Kolaborasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintah-swasta, atau pemerintah-masyarakat sipil mampu menghasilkan inovasi yang lebih berkelanjutan dibandingkan inovasi yang lahir dari kompetisi semata. Penelitian terbaru menemukan bahwa kemitraan memungkinkan terciptanya *trust-based governance*, yaitu kondisi di mana para aktor membangun hubungan kepercayaan sehingga proses koordinasi menjadi lebih efektif (Scott & Thomas, 2017). Selain itu, kemitraan berperan dalam memastikan konsistensi kebijakan antarlevel pemerintahan, terutama dalam konteks negara berkembang yang memiliki struktur birokrasi multi-level (Agrawal, Sethi & Benson, 2020). Hasil ini menunjukkan bahwa kemitraan adalah fondasi yang memungkinkan terjadinya harmonisasi tujuan kebijakan dan pemecahan persoalan kompleks melalui pendekatan kolaboratif.

Setelah menganalisis dinamika kompetisi dan kemitraan secara terpisah, temuan ketiga mengungkap bahwa integrasi keduanya memberikan efek sinergis dalam desain kebijakan pemerintah. Literasi kontemporer menyebut fenomena ini sebagai *coopetitive governance*, yakni kondisi di mana organisasi publik bersaing dan berkolaborasi secara simultan untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu (Leitão, Pereira & Nunes, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kompetisi-kemitraan menghasilkan pola hubungan yang lebih adaptif dibandingkan penggunaan salah satu pendekatan saja. Kompetisi meningkatkan dinamika kreativitas dan inovasi, sedangkan kemitraan menyediakan ruang koordinasi dan komitmen bersama. Integrasi ini menjadi penting dalam konteks kebijakan publik multidimensi seperti kebijakan lingkungan, digitalisasi pemerintahan, kesehatan masyarakat, dan tata kelola krisis. Sebagai contoh, dalam penanganan pandemi, banyak pemerintah daerah bersaing dalam mempercepat inovasi layanan digital dan respons kesehatan, namun tetap bekerja sama dalam mekanisme koordinasi nasional dan jaringan informasi kesehatan (Kettl, 2021). Temuan ini

menunjukkan bahwa integrasi keduanya memberikan kemampuan yang lebih kuat untuk menghadapi kondisi yang penuh ketidakpastian.

Penelitian ini juga menemukan bahwa integrasi kompetisi dan kemitraan sangat dipengaruhi oleh aspek institusional. Salah satu faktor kunci adalah struktur insentif dalam birokrasi. Literatur menunjukkan bahwa insentif yang terlalu kompetitif dapat menyebabkan fragmentasi kebijakan, sementara insentif kolaboratif tanpa tekanan kinerja justru menghasilkan stagnasi inovasi (de Vries, Tummers & Bekkers, 2016). Dengan demikian, desain kebijakan kolaboratif memerlukan pemetaan insentif yang seimbang, di mana kompetisi diarahkan untuk mendorong kreativitas, sedangkan kemitraan fokus pada koordinasi dan harmonisasi tujuan. Faktor kedua adalah kapasitas kepemimpinan kolaboratif. Pemimpin yang mampu mengelola konflik, membangun kepercayaan, serta menavigasi perbedaan kepentingan antaraktor memainkan peran penting dalam keberhasilan integrasi kedua dinamika tersebut (Ansell & Gash, 2018). Kepemimpinan adaptif menjadi prasyarat penting untuk mengelola hubungan kompetitif sekaligus kolaboratif.

Temuan lain menunjukkan bahwa faktor kapasitas organisasi dan tata kelola jaringan juga menentukan keberhasilan integrasi *Competitiveness–Partnership*. Studi menunjukkan bahwa organisasi publik dengan budaya inovatif, struktur fleksibel, dan sistem manajemen pengetahuan yang kuat lebih mampu memadukan dinamika kompetisi dan kemitraan secara efektif (Turrini et al., 2021). Selain itu, tata kelola jaringan yang menggunakan mekanisme koordinasi berbasis data, pertemuan rutin, serta sistem komunikasi yang transparan dapat mengurangi potensi konflik dan memperkuat hubungan *coopetitive* (O’Leary & Vij, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi kompetisi–kemitraan bukan hanya persoalan desain kebijakan, melainkan juga persoalan kesiapan organisasi dari sisi budaya, struktur, dan kapasitas internal.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya tantangan integratif. Pertama, integrasi kompetisi dan kemitraan rentan menimbulkan ketegangan antaraktor. Dalam beberapa konteks, aktor yang terlalu fokus pada kompetisi cenderung enggan berbagi informasi atau sumber daya yang dianggap sebagai keunggulan kompetitif institusi (Misuraca & Savoldelli, 2020). Di sisi lain, aktor yang terlalu menekankan kemitraan cenderung menghindari konflik, sehingga berpotensi mengurangi semangat inovatif dan kecepatan pengambilan keputusan. Kedua, masalah koordinasi menjadi isu besar ketika kompetisi dan kemitraan tidak diatur dengan mekanisme yang jelas. Koordinasi yang lemah menyebabkan tumpang tindih program, duplikasi inisiatif, dan inefisiensi kebijakan. Ketiga, ego sektoral dalam birokrasi sering menjadi penghambat integrasi, terutama dalam sistem pemerintahan yang memiliki banyak aktor dengan kewenangan berbeda. Meski demikian, literatur menegaskan bahwa tantangan ini dapat diatasi melalui regulasi yang jelas, mekanisme akuntabilitas kolaboratif, dan penguatan kepemimpinan lintas sektor (Janssen & van der Voort, 2020).

Berdasarkan keseluruhan temuan, diskusi penelitian ini menegaskan bahwa integrasi model *Competitiveness–Partnership* bukan hanya memungkinkan, tetapi juga sangat

diperlukan dalam desain kebijakan kolaboratif pemerintah. Integrasi ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk memanfaatkan kekuatan kompetisi yakni inovasi, kreativitas, dan dinamika perubahan tanpa mengorbankan stabilitas dan koordinasi yang dihasilkan oleh kemitraan. Di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan publik dalam dekade terakhir, pendekatan integratif ini mampu memberikan solusi yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini secara langsung menjawab pertanyaan dalam pendahuluan bahwa hubungan antara kompetisi dan kemitraan dalam administrasi publik tidak hanya dapat dipadukan, tetapi justru menghasilkan *policy synergy* yang lebih kuat daripada penerapan salah satu strategi secara terpisah.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi model *Competitiveness–Partnership* dalam desain kebijakan kolaboratif pemerintah merupakan pendekatan strategis yang mampu meningkatkan efektivitas tata kelola publik. Kajian literatur menunjukkan bahwa kompetisi tidak selalu membawa dampak fragmentatif, tetapi justru dapat mendorong inovasi, kreativitas, dan efisiensi apabila diatur melalui mekanisme kelembagaan yang tepat. Di sisi lain, kemitraan tetap menjadi fondasi penting dalam memastikan koordinasi, keselarasan kebijakan, dan stabilitas hubungan antaraktor. Hasil penelitian juga menegaskan bahwa integrasi keduanya mampu menciptakan *policy synergy* yang memperkuat kapasitas pemerintah dalam menghadapi persoalan publik yang semakin kompleks, terutama dalam konteks pemerintahan modern yang membutuhkan adaptabilitas tinggi dan inovasi berkelanjutan. Selain itu, keberhasilan integrasi sangat dipengaruhi oleh faktor struktural dan kelembagaan seperti insentif birokrasi, kepemimpinan kolaboratif, kapasitas organisasi, serta tata kelola jaringan yang efektif. Dengan demikian, hubungan kompetisi dan kemitraan tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat dipadukan menjadi model tata kelola yang lebih progresif dan responsif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan kebijakan publik ke depan. Pertama, pemerintah perlu merancang sistem insentif yang seimbang antara dorongan kompetitif dan kebutuhan kolaboratif agar inovasi dapat tumbuh tanpa mengorbankan koordinasi lintas aktor. Kedua, kapasitas kepemimpinan kolaboratif harus diperkuat melalui pelatihan, pengembangan kompetensi, serta mekanisme pembinaan yang mendorong pemimpin publik mampu mengelola dinamika kompetitif sekaligus menjaga harmoni kemitraan. Ketiga, struktur organisasi publik perlu diarahkan pada fleksibilitas, keterbukaan informasi, dan budaya inovatif agar integrasi kompetisi–kemitraan dapat berjalan efektif. Keempat, untuk implementasi kebijakan yang lebih berkelanjutan, diperlukan tata kelola jaringan yang terstandarisasi dan mekanisme akuntabilitas kolaboratif yang memastikan setiap aktor bekerja pada tujuan yang sama. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian melalui pendekatan empiris, seperti studi kasus atau analisis data kualitatif, guna menggali bagaimana integrasi kompetisi dan kemitraan berlangsung dalam praktik di berbagai level pemerintahan. Dengan langkah-langkah tersebut, model *Competitiveness–Partnership* berpotensi menjadi kerangka baru yang mampu memperkuat

reformasi kebijakan publik dan meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Referensi

- Agrawal, A., Sethi, G. & Benson, C. (2020) 'Polycentric governance and coordination challenges in developing countries', *World Development*, 135, pp. 1–12.
- Ansell, C. & Gash, A. (2018) 'Collaborative platforms as a governance strategy', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 28(1), pp. 16–32.
- Ansell, C. & Torfing, J. (2021) *Public Governance as Co-creation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bilodeau, N. (2018) 'Competitive dynamics and public sector performance', *Public Administration Review*, 78(3), pp. 356–368.
- Bryson, J.M., Crosby, B.C. & Stone, M.M. (2015) 'Designing and implementing cross-sector collaborations', *Public Administration Review*, 75(5), pp. 647–663.
- Chen, Y., Wang, Y. & Huang, Q. (2020) 'How collaborative and competitive dynamics shape public innovation', *Governance*, 33(4), pp. 1087–1105.
- Crosby, B., 't Hart, P. & Torfing, J. (2017) 'Public value creation through collaborative innovation', *Public Management Review*, 19(5), pp. 655–669.
- Emerson, K. & Nabatchi, T. (2015) *Collaborative Governance Regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Hafeez, K., Foroudi, P. & Nguyen, B. (2022) 'Coopetition strategy in public and private networks', *Journal of Business Research*, 139, pp. 1117–1129.
- Head, B. & Alford, J. (2015) 'Wicked problems: Implications for public policy and management', *Administration & Society*, 47(6), pp. 711–739.
- Janssen, M. & van der Voort, H. (2020) 'Agile and adaptive governance in crisis management', *Government Information Quarterly*, 37(2), pp. 1–9.
- Kettl, D. (2021) *The Divided States of America: Why Federalism Doesn't Work*. Princeton: Princeton University Press.
- Leitão, J., Pereira, D. & Nunes, A. (2020) 'Coopetition and public value creation', *International Journal of Public Sector Management*, 33(2/3), pp. 109–126.
- Meier, K. & O'Toole, L. (2014) *Public Management: Organizations, Governance, and Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mergel, I. (2019) 'Digital transformation of the public sector', *Government Information Quarterly*, 36(4), 101–113.
- Misuraca, G. & Savoldelli, A. (2020) 'Digital governance and tensions in public administration', *Information Polity*, 25(1), pp. 15–29.
- O'Leary, R. & Vij, N. (2018) 'Collaborative public management: Where have we been and where are we going?', *American Review of Public Administration*, 48(6), pp. 1–17.
- Purdy, J. & Jones, B. (2021) 'A complexity perspective on collaborative governance', *Public Administration Review*, 81(4), pp. 643–656.
- Rivera, J. & van der Meulen, N. (2022) 'Competition and digital transformation in local government', *Government Information Quarterly*, 39(3), pp. 1–12.
- Scott, T. & Thomas, C. (2017) 'Unpacking the collaborative toolbox', *Public Administration Review*, 77(5), pp. 712–725.
- Suharno, P. (2021) 'Innovation competition and collaborative governance in Indonesian local governments', *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), pp. 45–60.
- Tönurist, P. & Hanson, A. (2020) 'Innovation labs in the public sector: Competitive spaces for problem-solving', *Public Management Review*, 22(9), pp. 1393–1413.

- Turrini, A., Cristofoli, D., Valotti, G. & Nasi, G. (2021) 'Organizational capacity for collaborative governance', *Public Management Review*, 23(7), pp. 1023–1043.
- Walker, R., Andrews, R. & Boyne, G. (2015) 'Public sector competition, performance, and managerial strategy', *Public Administration*, 93(1), pp. 1–18.